

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

**EVALUASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PEKANBARU DALAM PEMBANGUNAN
SISTEM DRAINASE**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



DIRO PUJA KUSUMA

NPM : 147310215

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Diro Puja Kusuma
NPM : 147310215
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 20 Februari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Syafhendry, M.Si

Yendri Nazir, S.Sos, M,Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Mulianto, S.IP., M,Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Diro Puja Kusuma
NPM : 147310215
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Ketua,

Pekanbaru, 22 April 2019
Sekretaris,

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Yendri Nazir, S.Sos, M,Si.

Anggota,

Dr. Ahmad Fitra Yusa., S.IP., MA.

Mengetahui,
Wakil Dekan 1

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Diro Puja Kusuma
NPM : 147310215
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 22 April 2018

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Yendri Nazir, S.Sos, M.Si.

Turut Menyetujui
Wakil Dekan I,

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si.

Budi Mulianto, S.IP, M.Si.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk

Orang-orang yang kusayangi :

- Ayah dan Ibu yang tercinta, Karyadi dan Sriati yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup untuk membalas cinta ayah dan ibu padaku.
- Saudaraku Sindi Dwi Amara yang telah memberikan motivasi, saran dan masukan dalam penulisan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini menjadi sebuah karya ilmiah.
- Keluarga besar yang telah memberikan kelonggaran waktu sehingga dapat melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi sampai tuntas
- Serta sahabat-sahabatku seperjuangan di Kelas C Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 dan semua teman-teman kemudian adik-adik yang tak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karna atas rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan,kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase”**. Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Ialam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan.Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bimbingan dan semangat pada penulis baik moral maupun material guna menyelesaikan Usulan penelitian ini,

Antara lain :

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor UIR yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Moris Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Politik.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari awal permulaan pengajuan judul Usulan Penelitian ini sehingga sampai pada akhir ujian konferehensif.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam meluangkan waktu,pikiran dan tenaga demi kesempurnaan penelitian ini.
5. Bapak Yendri Nazir, S.Sos.M,Si selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu,pikiran dan tenaga demi kesempurnaan penelitian ini.
6. Bapak ibu segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini dan Bapak/Ibu serta Saudara/Saudari Staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran adminitrasi penyelesaian Usulan Penelitian ini.

7. Bapak Baharufahmi selaku kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan yang telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan.

8. Terimakasih kepada orang tua tercinta yakni Ayahanda Karyadi dan Ibunda Sriati atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat,dukungan,motivasi dan limpahan kasih sayang tiada henti serta terimakasih untuk kakak saya Diana wati yang selalu mensuport dan mengajarkan banyak hal selama saya kuliah.

9. Sahabat saya Kurniawan S.IP , Titis Sukma Anggraheni S.IP, Yogi Hanafi S.IP dan Nuryawan Eko Prabowo yang selalu menyemangati dan membantu penulis untuk cepet menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman seperjuangan terutama Ilmu Pemerintahan kelas C Angkatan 2014 yang sama-sama menuntut ilmu difakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

10. Adek-adeku Tercinta yakni Oki Rifaldo, Sindi dwi Amara, Rahmat Hidayat yang selalu mendoakan saya dan memberikan semangat kepada saya sampai pada akhir skripsi ini.

11. Buat sahabat terbaikku Siti Muawanah S.E sebagai penasehat yang baik dan selalu memberikan semangat kepada saya untuk cepet menyelesaikan skripsi ini.Terimakasih buat perhatian dan motifasinya.

12. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tak bisa disebut satu persatu,terimakasih untuk semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan kerindohan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian,Amin.

Pekanbaru, 18 April 2019

Pelaku pernyataan,

Diro Puja Kusuma



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRAC.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	18
2. Konsep Pemerintahan.....	19
a. Asas-asas Pemerintahan.....	22
b. Asas Pemerintahan Daerah.....	23
3. Konsep Organisasi Pemerintahan.....	24
4. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	26
5. Konsep Kinerja.....	29
6. Konsep Evaluasi.....	32
7. Konsep Evaluasi Kinerja.....	34
8. Konsep Drainase.....	37
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Pikir.....	41
D. Konsep Operasional.....	41
E. Operasional Variabel.....	45
F. Teknik Pengukuran.....	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	49

B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel	50
D. Teknik Penarikan Sampel	52
E. Jenis dan Sumber Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	58
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	59
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	59
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru.....	63
3. Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	66
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.....	68
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	71
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	73
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	74
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase.....	76
1. Efektivitas.....	77
2. Efisiensi.....	81
3. Kecukupan.....	85
4. Pemerataan	88
5. Responsivitas.....	92
6. Ketepatan.....	97
C. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase.....	101
D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pembangunan Sistem Drainase	105
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Data terkait program pembangunan system Drainase Lingkungan di Kota Pekanbaru per April 2018 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.	11
II.1	: Kriteria Evaluasi yang dilengkapi dengan ilustrasi menurut Dunn	39
II.2	: Penelitian Terdahulu Terkait dengan penelitian yang berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	45
II.3	: Distribusi Operasionalisasi Variable Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase.	32
III.1	: Distribusi Populasi Dan Sampel Peneliti Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	51
III.3	: Distribusi Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	58
IV.1	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2013.	64
IV.2	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia Di Kota Pekanbaru Tahun 2013	65
IV.3	: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru	67
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan	72
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	72
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan	73
V.4	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	74
V.5	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan	75

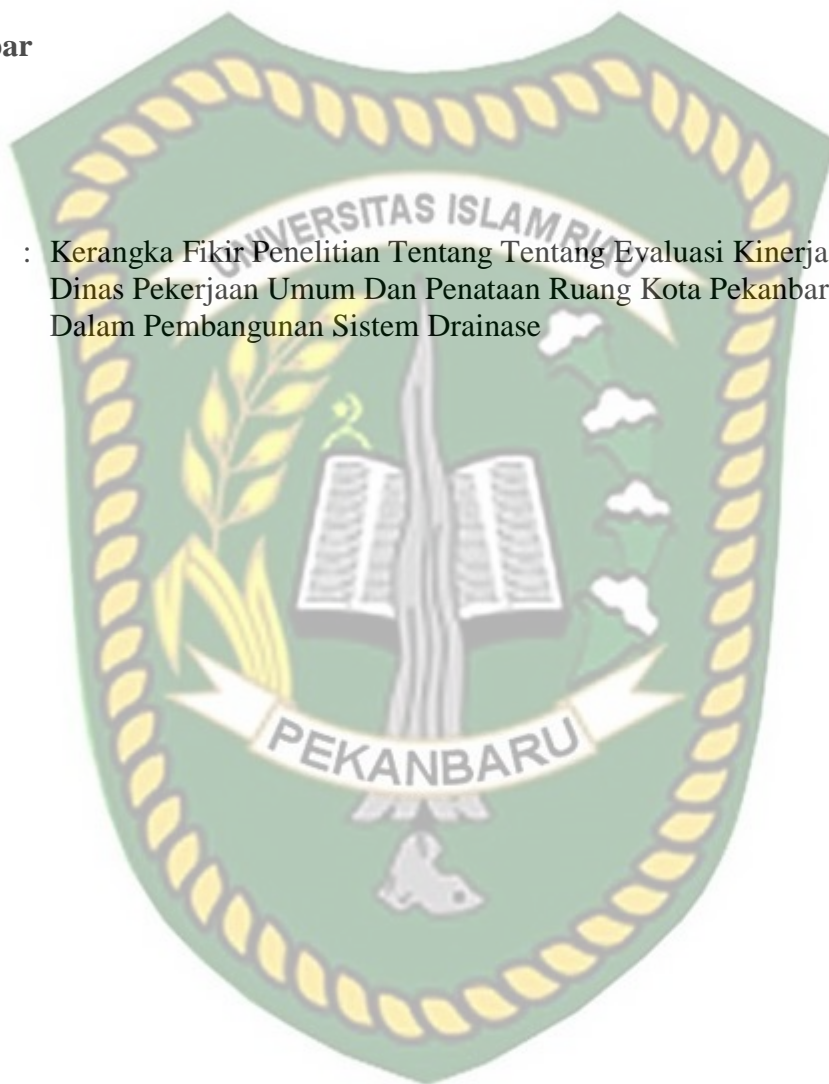
V.6	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	76
V.7	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Indikator Efektivitas	78
V.8	: Data terkait program pembangunan system Drainase Lingkungan di Kota Pekanbaru per April 2018 oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	79
V.9	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Efektivitas	82
V.10	: Ketersediaan Anggaran untuk proses pembangunan drainase di Kota Pekanbaru.	83
V.11	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Indikator Efisiensi	85
V.12	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Efisiensi	87
V.13	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Indikator Kecukupan	89
V.14	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kecukupan	91
V.15	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Indikator Pemerataan	93
V.16	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pemerataan	95
V.17	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Indikator Responsivitas	98
V.18	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Responsivitas	100
V.19	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	102
V.20	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

- II.I : Kerangka Fikir Penelitian Tentang Tentang Eyaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase 41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Kuisioner Untuk Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	122
2	: Kuisioner Untuk Masyarakat dengan judul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	118
3	: Daftar Wawancara Penelitian Tentang Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	124
4	: Rekap Telly Penelitian untuk Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	126
5	: Rekap Telly Penelitian untuk Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	128
6	: Dokumentasi Penelitian Tentang Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	130
7	: Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	132
9	: Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	136
10	: Dokumentasi Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Pekanbaru terkait Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	137
11	: Surat Keterangan Balasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru terkait Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase	139

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diro Puja Kusuma
NPM : 147310215
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 April 2019
Pelaku Pernyataan,

Diro Puja Kusuma

EVALUASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU DALAM PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE

ABSTRAK

Oleh
Diro Puja Kusuma

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terkait Pembangunan Drainase Di Kota Pekanbaru dan untuk Mengetahui Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pembangunan Sistem Drainase Di Kota Pekanbaru. Indikator dari penelitian ini adalah Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini adalah Servey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Prasarana, Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan dan Jembatan, Masyarakat sebagai Informan Penelitian untuk melengkapi Pembahasan Hasil Penelitian. Adapun teknik sensus yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah untuk populasi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan teknik *Purposive sampling* untuk kelompok populasi masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase “Cukup Baik”.

**EVALUATION OF PERFORMANCE OF PEKANBARU CITY GENERAL
AND SPACE MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF DRAINAGE
SYSTEMS**

ABSTRACT

By

Diro Puja Kusuma

Keywords : *Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy*

This study aims to analyze the Performance of the Office of Public Works and Spatial Planning Related to the Development of Drainage in the City of Pekanbaru and to Know the Constraints Faced by the Office of Public Works and Room Arrangement in the Construction of Drainage Systems in Pekanbaru City. The indicators of this study are Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. This type of research located in the city of Pekanbaru is Descriptive Servey, which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives in the studied location. The population used in this study is the Head of the Public Works and Room Arrangement of Pekanbaru City, Head of Infrastructure, Public Facilities and Utilities (PSU) of the Public Works Office and Pekanbaru City Spatial Planning, Society as Research Informants to complete the Discussion on Research Results. The census technique used in determining individual samples is for the population of employees of the Public Works and Spatial Planning Office and Purposive sampling techniques for community population groups, the types and data collection techniques used in this study consist of, primary data collected using questionnaires and interviews and Secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Performance Evaluation of the Public Works Agency and Pekanbaru City Spatial Planning in the Development of the "Pretty Good" Drainage System.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah daerah seperti kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten dan kota di bagi lagi menjadi daerah-daerah kecamatan yang di atur dalam undang-undang Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otomoni daerah dan tugas pembantunya.

Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri.

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, berlaku teori residu, kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi lima kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan pada tanggal 4 Mei 1999. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan Pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian: pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam pemerintahan dikenal sebuah istilah yaitu urusan pemerintahan absolut yang artinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Kemudian istilah lainnya adalah **urusan pemerintahan konkuren.** Definisinya adalah **Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar pelaksana otonomi Daerah.** Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Di dalam penyelenggaraan pemerintah tentunya memiliki tugasnya masing-masing, hal ini untuk mempermudah dalam mewujudkan visi dan misi yang akan di capai dalam suatu daerah. Di bututkannya pembentukan dinas-dinas maupun lembaga serta memiliki fungsi yang berbeda-beda. Khususnya dalam bidang pembangunan daerah, di dalam pembangunan daerah terbagi menjadi infrastruktur fisik maupun non fisik. Infrastruktur fisik seperti pembangunan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti bangunan sekolah, rumah sakit, jalan, drainase dan lain-lain. Infrastruktur non fisik seperti aliran listrik, jaringan telpon, jaringan internet, dan lain lain.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan pembangunan fisik seperti jalan dan drainase, Dinas yang bertugas adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum.
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum.
 - c. Membina dan melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum.
 - d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum.
 - e. Membina unit pelaksana teknis dinas dalam lingkungan tugasnya.
 - f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum;
 - c. Menyusun rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
 - d. Pembinaan dan pelaporan;
 - e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Adapun untuk mewujudkan tujuan-tujuan kerja yang telah dibuat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, maka dibuatlah Visi dan Misi yang harus di capai dalam pelaksanaan tugas, dan adapun Visi dan Misi Tersebut dapat di lihat dibawah ini:

1. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.

“Terwujudnya pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat dan nyaman serta prasarana jalan dan prasarana pengairan yang handal”
2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian banjir.
 - b. Meningkatkan fungsi jaringan jalan dalam kota.
 - c. Mewujudkan sarana dan prasarana pemukiman.
 - d. Membantu pembangunan gedung-gedung perumahan, dan utilitas pemerintah kota pekanbaru lainnya.

- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan mitra kerja lingkungan pekerjaan umum.

Dan adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru adalah untuk meningkatkan infrastruktur perkotaan, sarana, dan prasarana transportasi yang mendukung mobilitas perdagangan barang dan jasa.

Sementara itu sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru adalah:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru;
2. untuk membangun dan meningkatkan kualitas dan fungsi saluran drainase;
3. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pemukiman;

Infrastruktur merupakan salah satu alat untuk meningkatkan perekonomian pada suatu negara yang merupakan ruang lingkup besar hingga ruang lingkup terkecil seperti daerah-daerah maupun perdesaan. Oleh karena itu pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari perkembangan ekonomi selanjutnya. Infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi atau otonomi daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah.

Infrastruktur adalah sarana yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, sosial budaya dan kesatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada tidak hanya di wilayah Provinsi Riau. Pembangunan Infrastruktur mempunyai peran vital dan mewujudkan pemenuhan hak pada rakyat seperti, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Infrastruktur daerah adalah infrastruktur yang

dibangun pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih, jalan khas untuk kepentingan daerahnya.

Infrastruktur yang tidak kalah pentingnya yang harus di perhatikan oleh pemerintah adalah tentang saluran air atau drainase. Drainase adalah lengkungan atau saluran air dipermukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Drainase adalah Prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima Drainase Perkotaan, Drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat. Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan Prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.

Sistem Drainase Lokal Kws. Hunian, Kws. Industri Jalan, Kws. Komersil bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan jalan kawasan Komersial Hunian Industri. Sistem Drainase Perkotaan Pengendalian Banjir (*Flood Control*) Penanganan banjir limpasan sungai, Penanganan Drainase akibat genangan air limpasan sungai hujan Wilayah Perkotaan. Sementara di daerah daerah pusat perdagangan, drainase kota sering dibuat tersumbat oleh tindakan masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran. Dalam kondisi ini, penyelesaian masalah banjir erat kaitannya dengan penanganan sampah perkotaan. Solusi yang akan di kembangkan ke depan adalah pembenahan aliran air dan normalisasi anak sungai terus dilakukan untuk memperlancar aliran air. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menjelaskan mengenai Drainase yaitu Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik.

Khususnya untuk kota, pekanbaru yang memiliki drainase yang minim dan bisa di katakan ada yang tidak berfungsi di akibatkan timbunan dari aktivitas yang di lakukan oleh masyarakat, seperti penimbunan menggunakan tanah yaitu di simpang lampu arifin, tersumbat oleh sampah-sampah masyarakat seperti di pasar simpang arengka. Di daerah yang kerap terkea banjir pada saat musim penghujan yaitu di HR Soebrantas tepatnya Tabek Gadang yang kerap di genangi air. Di sana, hanya terdapat drainase yang ukurannya tidak proporsional untuk menahan intensitas air yang ada saat hujan. Sementara itu, drainase juga hanya berada di sisi kiri salah satu jalur sementara yang lainnya tidak ada.

Hal ini diakui Kasi Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru, Syamri kepada Riau Pos. Bahkan menurutnya, dari pendataan yang dilakukan tim nya, terdapat beberapa kelemahan di wilayah padat penduduk dan kendaraan tersebut.

“Kita perhatikan di sana memang terdapat beberapa masalah yang dapat mengakibatkan banjir. Salah satunya adalah drainase dan saluran pembuangan airnya. Jika itu bisa teratasi maka banjir tentu tidak terjadi lagi di wilayah itu, ” jelasnya. (<https:// drainase-kota-pekanbaru-minim/>)

Beberapa masalah yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah banjir di Tabek Gadang tersebut, diantaranya adalah dengan melebarkan drainase. Selain itu juga perlu dibangun gorong-gorong yang berada di atas persimpangan Tabek Gadang dengan ukuran lebih besar dari saat ini. Setelah itu, perlu juga memaksimalkan sungai kecil sebagai saluran pembuangan air yang hingga saat ini masih belum maksimal digunakan.

“Gorong-gorong dan sungai kecil di wilayah tersebut belum maksimal memperlancar pengeluaran air. Jadi saat hujan air terkepung dan mengaibatkan banjir. Sementara sungai kecil yang menjadi wilayah penting mengatasi banjir juga belum maksimal digunakan, makanya banjir selalu terjadi,” jelasnya. (Sumber : Wawancara Riau Post Dengan Kasi Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru, Syamri).

Hal tersebutlah yang terjadi di beberapa ruas jalan sehingga menyebabkan banjir saat hujan. Bahkan setelah pendataan hampir seluruh wilayah banjir terdapat di jalan milik provinsi dan negara. Seperti Jalan HR Soebrantas, Jalan Riau dan jalan Arifin Akhmad dan beberapa ruas jalan lainnya.

Meski ruas jalan yang masih tergenang air saat hujan bukan tanggungjawab mereka, tapi Dinas PU Pekanbaru tetap berkoordinasi dengan Dinas PU Riau. Bahkan ke depan mereka berencana membangun waduk di Jalan Cipta Karya untuk mengatasi masalah banjir di Tabek Gadang tersebut.

Pembangunan infrastruktur jalan di Pekanbaru menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan juga Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Pekanbaru. Selain Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, Permasalahan Drainase juga menjadi tanggung jawab Dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dimana untuk kawasan di dalam areal pemukiman, system drainasenya menjadi tanggung jawab dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, dan adapun Tugas Pokok dari Dinas Perumahan Rakyat yang menangani bidang-bidang permasalahan Drainase adalah Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Dimana tugas pokok yang mengatur bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu segaina tugas kepada Dinas dalam melaksanakan sub urusan prasarana, sarana dan utilitas Umum.
2. Bidang Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang terdiri dari Pemakaman, Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Sanitasi Lingkungan, RTH Lingkungan dan Air Bersih Skala Lingkungan.
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - c. Pelaksanaan Fasilitas penyediaan Lahan PSU Perumahan dan kawasan pemukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitase lingkungan, RTH Lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - d. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitase lingkungan, RTH Lingkungan dan Air Bersih skala lingkungan.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan system drainase di pekanbaru menjadi tanggung jawab yang di bebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan juga Dinas Perumahan Rakyat Kota Pekanbaru, dan adapun data terkait dengan program pembangunan Drainase yang sedang di lakukan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 : Data terkait program pembangunan system Drainase Lingkungan di Kota Pekanbaru per April 2018 oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

No	Jenis Program	Tahun Pelaksanaan	Detail Pelaksanaan Program	Keterangan
1	2	3	4	5

1	Saluran Drainase	2014-2015	2 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 2 Kecamatan. (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu atribusi kegiatan)
2	Saluran Drainase	2014-2015	3 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 3 Kecamatan. (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu atribusi kegiatan)
3	Saluran Drainase	2014-2015	7 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 7 Kecamatan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang ada di dalam tabel di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa program yang telah di rencanakan oleh Pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru hanya sampai pada tahun 2014-2015 saja, sementara itu tahun 2016 sampai dengan saat ini belum ada perencanaan program untuk pembangunan system Drainase, dengan berdasarkan fakta di lapangan dimana kawasan pemukiman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir yang di sebabkan oleh tidak adanya system drainase yang baik di kawasan pemukiman masyarakat.

Pelaksanaan desentralisasi, membuat pemerintah daerah harus mampu menjalankan berbagai kewenangan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab (*accountable*). Dengan kata lain pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. pelaksanaan otonomi daerah adalah juga upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Kinerja adalah

tingkat pencapaian tujuan organisasi. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan politik dan memberi kepuasan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Berkaitan dengan kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi utama memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang identik dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan dan jembatan, penerangan, air dan keperluan masyarakat lainnya). Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi penduduk negara. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri. Asumsi bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin baik pula pelayanan yang diberikannya.

Kota sebagai pusat dari segala kegiatan perdagangan dan jasa, administrasi, membuat kota menjadi tempat yang paling diminati atau menjadi tempat tujuan utama dari masyarakat sehingga semakin hari penduduk kota semakin bertambah padat dan kegiatan di dalam kotapun semakin meningkat. Hal itu membuat beban daerah perkotaan semakin berat. Disamping perkembangan perkotaan yang semakin maju dan tak terkendali lagi terutama dalam hal pembangunan gedung, harus disadari bahwa ada permasalahan yang ikut serta dalam perkembangan tersebut. Kawasan kawasan yang dahulu berfungsi sebagai kawasan resapan air mengalami alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, hal semacam itu dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan drainase untuk menampung dan juga untuk mengalirkan air dengan baik.

Drainase adalah salah satu aspek yang penting dalam menunjang infrastruktur suatu daerah maupun kawasan. Buruknya system drainase suatu kawasan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat antara lain; terganggunya aktivitas masyarakat karena adanya genangan, maupun dampak kesehatan bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Sistem jaringan drainase di suatu kawasan sudah semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Artinya kapasitas saluran drainase sudah diperhitungkan untuk dapat menampung debit air yang terjadi sehingga kawasan yang dimaksud tidak mengalami genangan atau banjir. Jika kapasitas sistem saluran drainase menurun dikarenakan oleh berbagai sebab maka debit yang normal sekalipun tidak akan bisa ditampung oleh sistem yang ada.

Sedangkan sebab menurunnya kapasitas system antara lain, banyak terdapat\endapan seperti tanah dan sampah, terjadi kerusakan fisik sistem jaringan dan adanya bangunan lain di atas sistem jaringan.

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, dan di tambah dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online di daerah Kota Pekanbaru, maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, dan fenomena tersebut adalah:

1. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, penulis menduga bahwa di kota Pekanbaru masih memiliki sistem drainase yang kurang baik, bahkan ada yang tidak berfungsi lagi, hal ini tentu belum sesuai dengan sasaran yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terkait dengan peningkatan kualitas dan fungsi drainase di Kota Pekanbaru. Hal ini diperkuat dari berita online Tribunpekanbaru.com bahwa ada beberapa titik jalan yang banjir setelah hujan, yaitu seperti Jl. Sudirman Simpang Hangtuh, Jl. HR. Soebrantas Simpang Tabek Gadang Panam, Jalan Arifin Ahmad depan kantor PAN Riau, Jl. Delima, Jl. Tuanku Tambusai.

(Sumber: <http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/04/17/drainase-di-pekanbaru-banyak-tak-berfungsi-sejumlah-jalan-digenangi-air>,diKutip pada tanggal 21 September 2018, Pukul 17:41)

2. Penulis menduga bahwa pembangunan system drainase di Kota Pekanbaru yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dan dengan data yang penulis dapatkan, program yang di susun oleh Dinas tersebut tidak ada Program pembangunan Drainase yang di dikerjakan untuk tahun ini. Hal ini di perkuat dari data yang penulis peroleh dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru bahwa untuk tahun 2018 tidak terdapat program untuk pembuatan saluran drainase. (Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru)

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum terkait dalam pembangunan Sistem Drainase Kota Pekanbaru. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian *“Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase”*.

B. Rumusan Masalah

Sistem Drainase adalah salah satu aspek yang penting dalam menunjang infrastruktur di dalam sebuah kawasan perkotaan. Apabila terjadi ketidak sempurnaan penataan system drainase yang ada pada sebuah kawasan perkotaan, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di dalam kota tersebut, dan beberapa permasalahan yang muncul akibat dari ketidak sempurnaan penataan Drainase adalah seperti: Terganggunya aktivitas masyarakat karena adanya genangan baik di kawasan jalan ataupun di kawasan lingkungan

perumahan tempat penduduk tinggal, dan juga akan berdampak kepada system kesehatan bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan, dan juga didukung dengan beberapa pemberitaan media cetak maupun online, penulis dapat mengambil dugaan bahwa di kota Pekanbaru masih memiliki permasalahan di bidang penataan system Drainase, dan hal ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dan Penataan Ruang memiliki peran penting dalam mengelola sistem saluran air atau drainase di Kota Pekanbaru. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **“Bagaimanakah Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase” ?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait pembangunan drainase di Kota Pekanbaru.
 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam permbangunan sistem drainase di Kota Pekanbaru.
- b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang Usulan Penelitian, penulis memaparkan teori yang menjadi bahan pendukung dan sangat diperlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian ini.

Definisi teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Syafie (2002:36) mendefinisikan ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga seta yang memerintah dengan yang diberikan perintah. Secara etimologis, definisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti : perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Menurut Rosenthal (dalam Ndraha 2005;321) merumuskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses itu secara internal maupun eksternal. Sedangkan Brasz merumuskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu di susun dan difungsikan, baik secara internal dan maupun eksternal, yaitu terhadap warga Negara.

Menurut Musanef (dalam Syafie 2003;32) mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi kordinasi pengawasan kedalam dan keluar.

2. Konsep Pemerintahan

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, (Serdamayanti, 2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara

masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Syafiie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintha maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, (Musaneff,1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dana para administrator itu sendiri.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara

keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

a. Asas-Asas Pemerintahan

1. Asas Pemerintahan Umum

Asas Pemerintahan umum menurut Syafiie (2015:81-83) adalah asas yang diterima di mana saja dan dapat terjadi kapan saja, terdiri dari:

1. Asas Vrij Bestuur

Vrij dalam bahasa Belanda berarti dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “kosong”, sedangkan *bestuur* (bahasa Belanda) adalah Pemerintahan

2. Asas *freies Ermessen*
Freies Ermessen adalah mencari ide baru dalam kesibukan urusan pemerintahan, seperti ketika aparat pemerintah melihat menumpuknya suatu bahan makanan di suatu daerah.
3. Asas Aktif
Pemerintah dikenal apabila banyak urusan disepanjang hari pekerjaan sehingga dikenal dengan istilah bila seorang hendak tidur sekalipun masyarakat masih perlu bantuan Pemerintah.
4. Asas Etis
Dalam setiap keputusan pemerintah menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu kaedah-kaedah moral.
5. Asas Historis
Ketika Pemerintah mengalami kejadian yang serupa dari tahun ke tahun maka secara historis mesti dipelajari mengapa hal tersebut terjadi.
6. Asas Otomatis
Walaupun aparat Pemerintahan dijabat oleh mereka yang memiliki pangkat yang relative paling rendah dibandingkan dengan instansi lain seperti para guru, para kepala dinas dan instansi vertikal maka tetap saja aparat pemerintah yang menjadi koordinator setiap kegiatan.
7. Asas *Detournement de Pouvoir*
Apabila suatu asas di atas ada yang tidak dijalankan, misalnya pemerintahan tidak mengisi kekosongan pejabat yang melaksanakan, tidak berinisiatif dalam pemerintahan, tidak etis dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak otomatis dalam menggantikan berbagai peran, tidak mempelajari sejarah masa lalu keorganisasian atau sebaliknya melakukan ide baru tetapi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, mengisi kekosongan tetapi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, aktif tetapi hanya disalahgunakan, begitu juga etika hanya untuk dirinya sedangkan untuk masyarakat bawah tidak diperhatikan kaidah moralnya, maka hal tersebut adalah perbuatan yang sewenang, wenang serta menyalahgunakan wewenang dan kedudukan.

2. Asas Pemerintahan Daerah

1. Desentralisasi
Adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal yang dimaksud dengan sebagian urusan adalah tidak semua urusan dapat diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti penyerahan urusan pertahanan keamanan akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintah pusat secara separatis

2. Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi). Jadi, begitu suatu departemen ditingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kepala kantor wilayah provinsi, atau pejabat kepala wilayah provinsi tersebut.

3. Tugas Pembantuan

Disuatu pihak pemerintah pusat khawatir penyerahan semua urusan kepada daerah akan membuat daerah menjadi separatis, tetapi di pihak lain pemerintah daerah curiga karena pemerintah pusat akan merongrong kekayaan daerah maka tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah selesai dari dulu.

b. Teknik-Teknik Pemerintahan

1. Teknik Koordinasi Pemerintahan

Menurut Henry Fayol dalam Syafiie, (2015:88), yaitu sebagai berikut:

“Mengkoordinasikan berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelarakan semua kegiatan dan usaha” “Koordinasi bisa juga disebut sebagai penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan, serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak kita temui tumpang tindih pekerjaan.

2. Teknik Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi hanya dapat berlaku dalam organisasi yang besar seperti organisasi Pemerintahan karena suatu organisasi birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam organisasi. Untuk Negara-negara yang perkembangannya lambat, kesukuan masih dipertahankan percaya kepada hal-hal mistik, keberadaan birokrasi sebagai pencegahnya tentu sangat diperlukan, tetapi bagi Negara-negara yang kehidupannya sudah modern, kesadaran lingkungan yang tinggi, serta membutuhkan pendemokrasian lebih mapan, menginginkanantisipasi keseimbangan berupa kelonggaran birokrasi. Selama ini banyak pakar yang menulis dan meneliti tentang birokrasi, yaitu bahwa fungsi dari staf pegawai administrasi memiliki cara-cara spesifik agar lebih efektif dan efisien, yaitu:

- a. Kerja yang ketat pada pertauran
- b. Tugas yang khusus
- c. Kaku dan sederhana
- d. Penyelenggaraan yang resmi
- e. Pengaturan dari atas ke bawah
- f. Berdasarkan logika
- g. Tersentralisasi pada pusat
- h. Taat dan patuh
- i. Disiplin
- j. Terstruktur
- k. Tanpa pandang bulu. (Henry Fayol dalam Syafiie, 2015:88)

3. Konsep Organisasi Pemerintahan

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafiie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang

yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafiie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. (Mahmudi, 2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
2. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, kemandirian, kesehatan, pendidikan, transportasi,

dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.

3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.
4. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
5. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
6. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
7. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Pada pendekatan manajerialisme, fungsi-fungsi strategik seperti perumusan strategi, perencanaan strategik, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. Manajerialisme sektor publik

berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya jangka panjang (Mahmudi, 2010:37).

Ada beberapa pengertian manajemen yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain: menurut (Manullang, 2002:2) yang mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang disiapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

Selain itu, menurut Stoner dan Wankel (dalam Siswanto, 2002:2) manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Menurut Sikula dalam (Hasibuan, 2006:2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Pada konteks manajemen publik barang dan jasa yang dihasilkan bukan dalam bentuk profit atau keuntungan tapi dalam bentuk pelayanan publik.

Definisi mengenai manajemen juga dikemukakan oleh Terry (Hasibuan, 2006:2) yang mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen sebagai suatu

proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen mencakup penentuan tujuan, bagaimana rencana untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan dan memaksimalkan sumber daya yang ada, yang kesemuanya difokuskan dalam rangka pencapaian tujuan di organisasi tersebut.

5. Konsep Kinerja

Sebelum mengetahui pengertian pengukuran kinerja dan indikator kinerja, terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep kinerja itu sendiri. Menurut Indra Bastian (2006 : 274), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Veizal Rifai (2004:309), mengemukakan kinerja, yaitu perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.

Definisi kinerja organisasi menurut Wibowo dan Atmosudirjo (dalam Harbani Pasolong, 2007:176) adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Selanjutnya definisi kinerja organisasi menurut Chaizi Nasucha (2004: 107) adalah efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui suatu usaha

sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Kinerja organisasi (Surjadi, 2009:7) adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hasibuan (2005:105) dalam bukunya “Kinerja Managemen SDM” menyatakan bahwa, “Kinerja” adalah suatu hasil yang didapat dari seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”.

Dari pengertian tersebut, kinerja dapat pula kita artikan sebagai suatu proses yang diarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Adapun proses menunjukkan bagaimana pekerjaan terlaksana. Selanjutnya Husein Umar (2004:76) mengatakan bahwa pengertian kinerja sebagai berikut:

“Kinerja adalah keseluruhan dan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan rasio kecil dibandingkan secara dengan hasil yang dicapai”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa makna kinerja menunjukkan taraf tercapainya hasil setelah melakukan proses usaha yang dilakukan secara sistematis. Kerja yang efektif dapat dilakukan dengan sikap mental yang berpandangan bahwa mutu kerja merupakan aspek yang dikedepankan. Pendapat lain menurut Winardi (2003:118), mengatakan bahwa

pengertian kinerja sebagai berikut: “Kinerja yaitu tingkatan hingga dimana tujuan-tujuan dicapai. Dengan demikian kinerja sinonim dengan hasil pekerjaan”.

Dari konsep-konsep yang dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh pengertian bahwa kinerja adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi atau institusi.

Kata kinerja (*Performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Para pakar banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, di antaranya:

1. Kinerja adalah catatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
2. Kinerja adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
3. Kinerja adalah pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan pengorganisasian seseorang.
4. Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ada dua komponen penting yang terkandung di dalam kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi; berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya.
2. Produktivitas; kompetensi di atas dapat diterjemahkan ke dalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (*outcome*).

Seperti yang dikemukakan Husein Umar (2004:260) bahwa kinerja merupakan fungsi dari usaha (*effort*) dengan kemampuan (*abilities*), dimana usaha tersebut dipengaruhi oleh motivasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi menurut Pasolong (2010:175). Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance*

(Prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti:

- a. Sesuatu yang dicapai,
- b. Prestasi yang diperlihatkan,
- c. Kemampuan kerja. Pengertian kinerja (Prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (Mangkunegara, 2005 : 67).

6. Konsep Evaluasi

Sebagai rangkaian dari fungsi pengawasan dalam manajemen adalah penilaian (*evaluating*). Proses pelaksanaan evaluasi atau penilaian sangat penting dalam proses manajemen, karena dengan evaluasi itulah dapat dipastikan ada atau tidak adanya kemajuan manajemen dalam menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan evaluasi yang sistematis dan tepat dapat diketahui adanya kemunduran atau kemajuan organisasi, sehingga dapat dilakukan tindakan tepat untuk mendinamisasikannya.

Evaluasi menurut Taliziduhu Ndraha (2003:201) dalam bukunya Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), mendefinisikan: “Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya”.

Evaluasi menurut Yusuf (2000:3) adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepannya.

Selanjutnya, menurut Payaman J Simanjuntak (2005:105). Dikatakan bahwa penilaian (evaluasi) adalah: “Bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu evaluasi dan pengawasan”.

Dengan demikian kita biasa memahami evaluasi/penilaian sebagai suatu proses estimasi atau menetapkan nilai, penampilan, kualitas atau status dari beberapa objek, orang atau benda.

Mengacu pada beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi adalah serangkaian upaya untuk menilai dan membandingkan sejauh mana kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang semestinya dicapai.

Istilah evaluasi dapat disamakan pula dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*) atau kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Sedangkan dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Atau juga evaluasi digunakan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan mencapai dampak yang diinginkan.

Evaluasi juga memiliki makna penilaian, Andrew F. Sikula (Hasibuan, 2002:97) menjelaskan bahwa “Penilaian ialah suatu proses mengestimasi atau penerapan nilai, penampilan, kualitas, atau status dari beberapa objek, orang atau benda”.

Saydam (2000:12) berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan *alternative* yang tepat dan mengambil sebuah keputusan.

Subarsono (2009:119) berpendapat bahwa, evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai

sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Adapun kriteria/indikator Evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah di tetapkan.
- b. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan
- c. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu.
- e. Responsivitas, responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketepatan, ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Dengan demikian evaluasi juga merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dnegan harapan-harpan yang ingin diperoleh.

7. Konsep Evaluasi Kinerja

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), katakata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

Tabel II.1 Kriteria Evaluasi yang dilengkapi dengan ilustrasi menurut Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang di inginkan telah tercapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan?	Unit Biaya Manfaat Bersih Rasio Biaya-Manfaat.
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldorHicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompokkelompok tertentu?	Konsistensi dengan survai warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber : Dunn, 2003:610

Berdasarkan kriteria di atas, evaluasi membagi beberapa tipe kriteria diantaranya: efektivitas merupakan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Intinya adalah efek dari suatu aktivitas. Kedua yaitu efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Ketiga, kecukupan merupakan sejauhmana tingkat efektivitas dalam memecahkan masalah untuk memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Adapun menurut Siagian (2005:174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah *before*.
- b. Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- c. Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202)

8. Pengertian Drainase

Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menanggulangi persoalan kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah. Kelebihan air dapat disebabkan intensitas hujan yang tinggi atau akibat durasi hujan yang tinggi. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia (Wikipedia,2014).

Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (*interceptor drain*), saluran pengumpul (*collector drain*), saluran pembawa (*conveyor drain*), saluran induk (*main drain*) dan badan air penerima (*receiving water*). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya, seperti gorong-gorong, siphon, pelimpah, bangunan terjun dan stasiun pompa (Suripin, 2004:45).

Persyaratan dalam perencanaan drainase adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan drainase harus sedemikian rupa sehingga fungsi fasilitas drainase sebagai penampung, pembagi dan pembuang air sepenuhnya berdaya guna dan hasil guna.
2. Pemilihan dimensi dari fasilitas drainase harus mempertimbangkan faktor ekonomi dan faktor keamanan.
3. Perencanaan drainase harus mempertimbangkan segi kemudahan dan nilai ekonomis terhadap pemeliharaan sistem drainase tersebut.

Dalam merencanakan drainase permukaan jalan dilakukan perhitungan debit aliran, perhitungan dimensi serta kemiringan selokan dan gorong-gorong, rumus-rumus, tabel, grafik serta contoh perhitungannya. (SNI 03-3424 : Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, 1994)

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Menurut Suripin

(2004:7) dalam bukunya yang berjudul Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan tapi juga air tanah.

Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian.

Teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain Dalam penelitian, penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. (Masyhuri dan Zainuddin, 2008: 100).

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian yang sedang penulis kerjakan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait dengan penelitian yang berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pebriana S Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Tahun 2013	Penataan Infrastruktur Drainase Kota Pekanbaru	Persamaan Penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah objek yang diteliti adalah bidang Drainase yang ada di Kota Pekanbaru. Persamaan lain yang ada kaitannya antara penelitian terdahulu dengan yang sedang penulis kerjakan adalah lokasi penelitian sama-sama di lokasi Kota Pekanbaru.	Perbedaan yang ada antara Penelitian Terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah perbedaan dalam segi waktu, dimana penulis melakukan penelitian pada tahun 2018, sementara saudara Pebriana melakukan penelitian pada tahun 2013.
2	Ingrit Regina Pangkey. 1053010045	Evaluasi Kinerja Sistem Drainase Di Wilayah Pusat Kota	Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu milik saudara Ingrit Regina Pangkey dengan penelitian yang penulis kerjakan adalah	Sementara Perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah segi Lokasi dan

		Amurang Berdasarkan Persepsi Masyarakat.	focus penelitian yang ada pada system drainase perkotaan.	Waktu Penelitian, Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, Sementara Penelitian Terdahulu di Lakukan Di Kota Amarung.
No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Mega Elisabeth P.	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Toba Samosir.	Persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah dari segi Subjek, dimana penelitian sama-sama di lakukan pada Dinas Pekerjaan Umum pada masing-masing Kota yang menjadi tempat Penelitian.	Sementara Perbedaan yang ada antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang sedang Penulis Kerjakan adalah Objek Penelitiannya, dimana Saudara Mega, melakukan penelitian pada Pemeliharaan Jalan, sementara Penulis melakukan penelitian terkait dengan Drainase Jalan di Kota Pekanbaru.
4	Yohanes F.C. Ransun	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah	Persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dari segi subjek, dimana penulis meneliti di Dinas Pekerjaan Umum.	Sedangkan perbedaan yang ada di antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah objek penelitian. Penulis meneliti tentang Pembangunan drainase sedangkan Yohanes meneliti tentang pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah.

5	Yodha Merlyn	Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Kinerja Sistem Drainase	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah dari segi objeknya yaitu Sistem drainase	Sedangkan perbedaanya adalah, jika penulis meneliti tentang evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dan penelitian terdahulu meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam kinerja sistem drainase.
---	--------------	--	--	---

Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2018.*

C. Kerangka Pikir

Gambar II.I : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase



Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2018*

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini Maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.
2. Organisasi Pemerintahan adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.
3. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang disiapkan dalam rangka pencapaian tujuan.
4. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
5. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, sehingga diperoleh

informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Evaluasi yang dimaksud adalah untuk menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pembangunan drainase di Kota Pekanbaru.

6. Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menanggulangi persoalan kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah. Kelebihan air dapat disebabkan intensitas hujan yang tinggi atau akibat durasi hujan yang tinggi. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia

7. Indikator Evaluasi Kinerja Adalah :

a. Efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

b. Efisiensi.

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya

ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

c. Kecukupan.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

d. Pemerataan.

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

e. Responsivitas.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan

kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

f. Ketepatan.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.II : Oprasionalisasi Varibel Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
Kinerja adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu	Evaluasi.	1. Efektivitas	a. Penyusunan Program Pembangunan Drainase. b. Pelaksanaan Riset Terkait Daerah yang harus dilakukan pembangunan Drainase.	Nominal
		2. Efisiensi	a. Pembentukan Tim Kerja. b. Ketersediaan Anggaran Kerja.	Nominal

organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Surjadi, 2009:7)	3. Kecukupan	a. Pelaksanaan Perbaikan Terhadap Drainase yang rusak. b. Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Kondisi Drainase di Lapangan.	Nominal
	4. Pemerataan	a. Pelaksanaan Perawatan Terhadap Drainase. b. Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Masyarakat Untuk Menjaga Drainase.	Nominal
	5. Responsivitas	a. Tanggap Terhadap Perkembangan Kondisi Di Lapangan. b. Memberikan Respon Terkait Laporan Kerusakan Drainase.	Nominal
	6. Ketepatan	a. Pelaksanaan Koreksi Terhadap Drainase Yang Tidak Berfungsi Maksimal. b. Pembangunan Drainase Sesuai Dengan Kapasitas Yang Di Butuhkan.	Nominal

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2018

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase berada dalam persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase berada dalam persentase antara 34% - 66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase berada dalam persentase antara 1% - 32%

A. Efektivitas

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala 67% - 100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala 34% - 66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala 1% - 32%

B. Efisiensi.

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi berada pada skala 67% - 100%.

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi berada pada skala 34% - 66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi berada pada skala 1% - 32%

C. Kecukupan.

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala 34% - 66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala 1% - 32%

D. Perataan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perataan berada pada skala 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perataan berada pada skala 34% - 66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Perataan berada pada skala 1% - 32%

E. Responsivitas

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 34% - 66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 1% - 32%

F. Ketepatan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala 67% - 100%

Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala 34% - 66%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala 1% - 32%



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang sedang diteliti antara fenomena-fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimanakah Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase.

Kemudian metode yang di gunakan di dalam penyusunan penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Hal ini di sebabkan Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai berikut:

“Metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetail dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram sangat memudahkan untuk di baca.” Sugiyono (2012;8)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Alasan yang mengiring peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah dengan ditemukannya banyak fenomena dilapangan yang menggambarkan bahwa system drainase yang ada di Kota Pekanbaru belum berkeja secara maksimal, hal ini di buktikan dengan masih terjadinya banjir disaat musim hujan telah tiba seperti Jl. Delima (H.R Soebrantas), Jl. Soekarno Hatta (Simpang Arifin Ahmad), Arifin Ahmad (Simpang Jl. Paus).

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kota Pekanbaru, dan Pegawai, dan yang terakhir adalah masyarakat Kota Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representatif (mewakili). Agar dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap. Dan untuk melihat keseluruhan sampel pada penelitian ini maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase.

No	Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan dan Jembatan. (Bapak Baharufahmi)	1	1	100%
2	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	47	20	42%
Jumlah		47	42	-

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru 2019

Tabel III.2 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Terhadap Responden Masyarakat. Yang Berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase.

No	Populasi	Jumlah	
		Alamat	Sampel
1	Jl. HR.Soebrantas. (Sim. Delima Panam)	RT 01 / RW 02 Kel, Delima	4
2	Jl.Arifin Ahmad (Simpang Jl.Paus)	RT 02 / RW 16 Kel T.Tengah	4
3	Jl. Kaharudin Nasution	RT 03/RW 08 Kel. Maharatu	4
4	Jl. Riau Ujung	RT 05 / RW 03 Kel. Air Hitam	4
5	Jl.Dharma Bakti (Sigunggung)	RT 01 / RW 02 Kel. LB.barat	4
Jumlah			20

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru digunakan tehnik sensus yaitu adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya (*true value*), atau sering juga disebut parameter.

- b. Untuk pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk penarikan sampel pada kategori ini di gunakan Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.
- c. Untuk Masyarakat digunakan teknik accidental sampling, pemilihan sample secara kebetulan atau aksidental Sampling, juga disebut pemilihan sample konvenien (*ocnvenience sampling*), merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau di jumpai menurut keinginan peneliti. Misalnya penelitian tentang pendapat umum mengenai Ketertiban Umum dengan mempergunakan setiap warga negara yang telah dewasa sebagai unit sampling. Peneliti mengumpulkan data langsung dari setiap orang dewasa yang dijumpainya, sampai jumlah yang diharapkan terpenuhi

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden

- b. Tanggapan responden terhadap Kuesioner yang penulis tanyakan tentang indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dan adapun data yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah yang berkaitan dengan:

- a. Sejarah singkat mengenai Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian yaitu Kota Pekanbaru
- c. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.
- d. Dokumentasi Penelitian baik di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru atau Dokumentasi dengan Masyarakat di Lapangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pihak-pihak berwenang yang memberikan informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

1. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden. Dalam penelitian ini, responden

yang diberikan kuisisioner adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Masyarakat yang dijadikan sampel. Pertanyaan yang diberikan melalui kuisisioner berkaitan langsung dengan indikator variabel penelitian.

Cara penulis menyebarkan angket kepada sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah dengan cara, yaitu penulis ke lapangan langsung menemui masyarakat yang berada di masing-masing lokasi yang telah penulis tentukan, dan juga menemui secara langsung responden dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Khusus untuk masyarakat, penulis melakukan penyebaran kuesioner dengan cara mendatangi lokasi-lokasi yang telah di tetapkan, dan menemui masyarakat secara acak yang dilakukan secara bertahap dan masing-masing lokasi penelitian memiliki sampel sebanyak 4 Orang responden masyarakat.

2. Observasi

Teknik Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Menurut Sugiyono (2013: 64) melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian yaitu lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian seperti jalan Jalan HR.Soebrantas Panam, Jl.Arifin Ahmad, Jl.Kaharudin Nasution (Depan Kampus UIR), Jl.Sudirman depan Awal Bros, Jl.Riau,

Jl. Durian Labuh Baru, dan lokasi lain yang memang memiliki masalah pada system drainasenya. Adapun data yang dapat penulis dari pelaksanaan observasi adalah menyajikan data terkait fakta yang terjadi dilapangan.

Dimana sebelum melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui angket, peneliti terlebih dahulu melakukan pengurusan surat riset yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, surat yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik selanjutnya surat tersebut dilanjutkan sampai ke Kesbangpol Kota Pekanbaru untuk selanjutnya di keluarkan surat tembusan yang bertujuan untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 82) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun berita media online, dokumentasi eksternal berisi bahan-bahan informasi berupa buku, jurnal ilmiah, data internet berkaitan yang membantu penelitian. Dan dokumentasi yang penulis dapatkan dari hasil penelitian ini adalah seperti kondisi jalan-jalan yang menjadi focus penelitian, dokumentasi penulis dengan responden, dokumentasi penulis terkait dengan berkas-berkas pendukung ke absahan penelitian, dan dokumentasi lainnya yang

menjadi pelengkap dalam membuktikan kebenaran dalam penelitian ini.

4. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Dan kemudian, teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau orang-orang atau responden yang di jadikan sampel dan dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Menurut (Moleong, 2005:186) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai sumber informasi yang menjembatani peneliti pada para bawahannya. dimana adapun langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan.
- Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- Mengawali atau membuka wawancara.
- Melangsungkan alur wawancara.
- Mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- Menuliskan hasil wawancara.
- Identifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2012;147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat

Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- 1) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- 2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- 4) Keputusan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
- 5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- 7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- 9) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- 10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah

menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2013.

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
Jumlah		458.059	446.020	887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2013

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
Jumlah		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota,

sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1.	Kecamatan Tampan	Simpang baru Sidomulyo barat	Tuah karya Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	Labuh Baru Timur Tampan/	Air hitam Labuh baru barat

3.	Kecamatan Bukit Raya	Simpang tiga Tangkerang Selatan	Tangkerang Utara Tangkerang Labuai
----	----------------------	------------------------------------	--

1	2	3	
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah Tangkerang Barat	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo
5.	Kecamatan Tenayan Raya	Kulim Tangkerang Timur	Rejosari Sail
6.	Kecamatan Sail	Cita Raja Suka Maju Suka Mulia	
7.	Kecamatan Lima Puluh	Rintis Sekip	Tanjung Rhu Pesisir
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	Simpang empat Sumahilang Tanah Datar	Kota Baru Suka Ramai Kota Tinggi
9.	Kecamatan Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kampung dalam Kampung Bandar Kampung Baru
10.	Kecamatan Sukajadi	Jatirejo Kampung tengah Kampung melayu	Kendungsari Harjosari Sukajadi Pulau koran
11.	Kecamatan Rumbai	Limbunsari Muara fajar	Rumbai bukit Palas Sri meranti
12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pandek Limbungan Lembah sari	Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2018

B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Departemen Pekerjaan Umum adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebelumnya, Departemen Pekerjaan Umum sempat bernama: Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah (2000-2004), adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang

membidangi urusan pekerjaan umum. Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Openbare Werken* yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Waterstaat Swerken*. Setelah Belanda menyerah dalam perang Pasifik pada tahun 1942 kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintah, yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan Indonesia Timur dan tidak ada pusat Pemerintah tertinggi di Indonesia yang menguasai ke-3 wilayah tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentuk setelah ditetapkan undang-undang darurat No 19/1957 kemudian diundangkan dengan Undang-Undang No.61 tahun 1958. Pekerjaan umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Adapun fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang jalan dan jembatan;
2. Perancangan program kerja Kebinamargaan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang jalan dan jembatan;
4. Pembinaan dan fasilitasi bidang jalan dan jembatan lingkup provinsi kabupaten/kota;
5. Pelaksanaan tugas bidang bina teknik, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. Pelaksanaan Tugas Pembuatan di Bidang jalan dan jembatan;
7. Pembuatan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

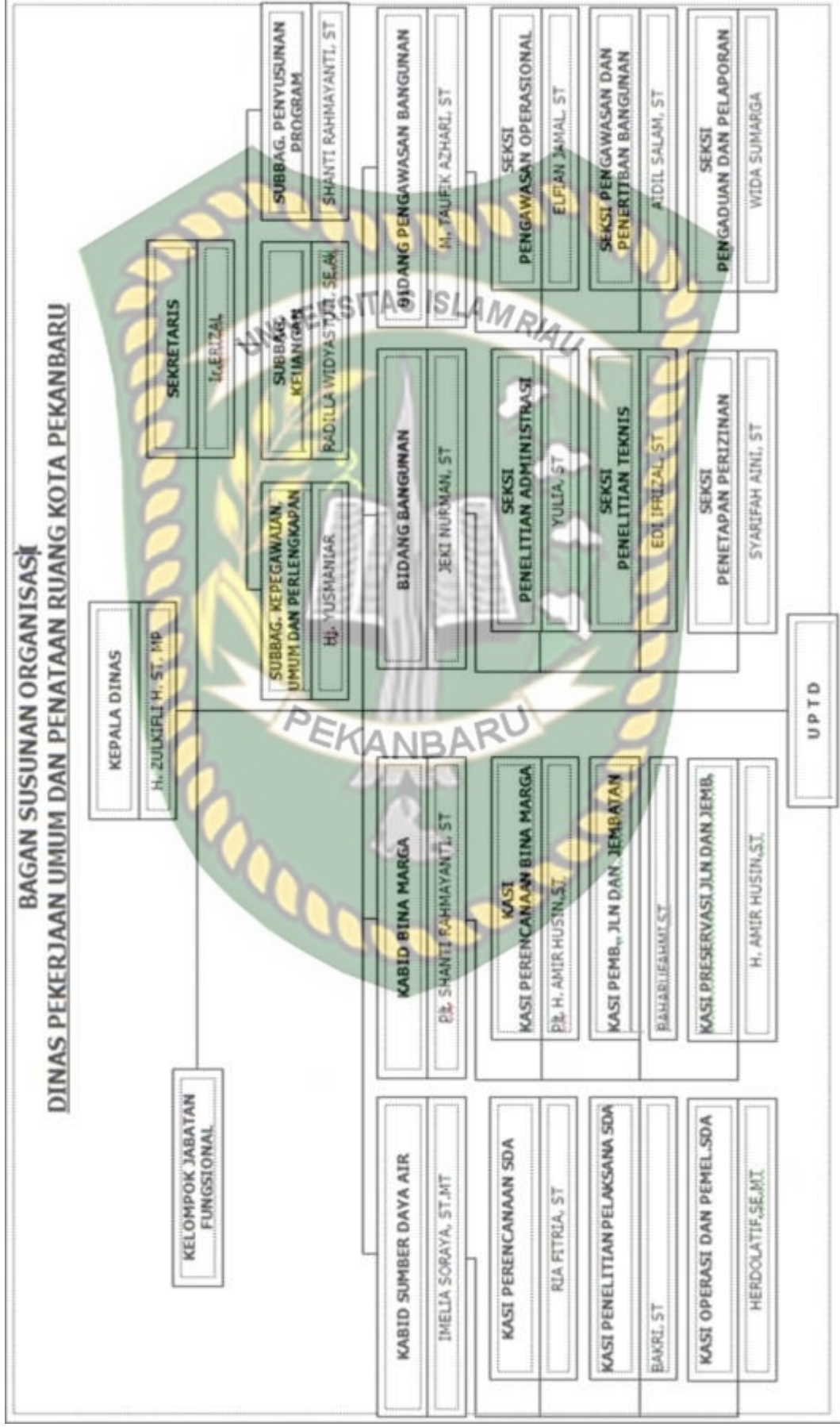
9. Penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurat akibat bencana dalam bidang ke Binamargaan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase, jadi data-data yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari masyarakat dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dengan menyebarkan kuesioner masing-masing berjumlah 20 sampel, serta melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang dan Kepala Bidang Prasarana berjumlah 1 orang, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Selain itu penulis menilai bahwa pentingnya penulis untuk mengetahui usia dan pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap penelitian penulis. Kriteria usia yang penulis tentukan yang dijadikan sebagai sampel adalah orang yang sudah memiliki pemikiran yang sudah dewasa dan bisa memilah yang terbaik. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase, serta dengan cara penyebaran kuesioner maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin berikut ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	17	85%
2	Perempuan	3	15%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Pegawai Pekerjaan Umum yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 17 orang dengan persentase 85%, sedangkan untuk responden perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 15% Total keseluruhan responden mencapai 20 Orang responden.

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	12	60%
2	Perempuan	8	40%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 12 orang dengan persentase 60%, sedangkan untuk perempuan berjumlah 8 orang dengan persentase 40% dari total keseluruhan masyarakat 20 orang.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas ke dua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan latar belakang usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan penelitian ini, karena semakin matang usia seseorang maka cara berfikirnya pun tentunya sudah berbeda dengan seseorang yang belum memiliki cukup umur. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	0	0%
2	31-40 Tahun	15	75%
3	41-50 Tahun	5	25%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hsil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum, responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun dengan jumlah 15 orang dengan persentase 75% dan usia pada 41-50 Tahun yang berjumlah 5 orang dengan persentase 25%, dari total keseluruhan jumlah pegawai 20 orang.

Tabel V.4 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	9	45%
2	31-40 Tahun	10	50%
3	41-50 Tahun	1	5%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hsil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.4 diatas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat, responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 50% dan usia pada interval 20-30 Tahun yang berjumlah 9 orang dengan persentase 45%, sedangkan usia paling minim adalah 41-50 Tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 5%.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dan identitas yang ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan berdasarkan latar belakang pendidikannya, rata-rata responden masyarakat memiliki pendidikan SMA sedangkan untuk pegawai Dinas Pekerjaan Umum rata-rata memiliki pendidikan Strata Satu (S1). Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun

dalam melakukan suatu tindakan. Dari hasil penelitian tentang tentang Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase, serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Pendidikan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	0	0%
4	Diploma	0	0%
5	Sarjana S1/S2	20	100%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden pegawai Dinas Pekerjaan Umum adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase dominannya adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 12 orang (60%), responden yang memiliki pendidikan SMP berjumlah 6 orang (30%), sedangkan responden yang paling minim memiliki pendidikan SD yaitu berjumlah 2 orang (10%). Hal ini dikarenakan pada saat di lapangan bahwa pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2), alasannya adalah karena yang mengerti konstruksi bangunan baik

itu jalan ataupun drainase memang hanya orang yang berpendidikan dari perguruan tinggi yaitu sarjana tehnik ataupun tamatan arsitek.

Tabel V.6 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	14	70%
4	Diploma	1	5%
5	Sarjana S1/S2	5	25%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden masyarakat adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase dominannya adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 14 orang dengan persentase 70%, dan responden yang memiliki pendidikan Sarjana S1/S2 berjumlah 5 orang dengan persentase 25%, dan yang paling minim adalah masyarakat yang memiliki pendidikan Diploma yaitu 1 orang dengan persentase 5% dari total keseluruhan 20 orang masyarakat.

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. Ada beberapa

indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase adalah berdasarkan teori dari Dunn (dalam Subarsono, 2013:126). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang pertama adalah: Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator Efektivitas maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelesan-penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan baik di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

1. Efektivitas

Efektivitas menurut Dunn (dalam Subarsono, 2013:126) adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkatan output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti manjur, mempan atau mujarab, (2) penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil daya guna (mencapai hasil yang optimal). Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan

perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, dan dapat memberikan efek maka dapat dikatakan efektif. Jadi efektivitas merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan seseorang. Dapat dikatakan efektif jika pekerjaannya tepat pada waktu, biaya, serta kualitasnya. Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, penyusunan program pembangunan drainase, dan pelaksanaan riset terkait daerah yang harus dilakukan pembangunan drainase.

Tabel V.7 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penyusunan Program Pembangunan Drainase	17 (85%)	3 (15%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Pelaksanaan Riset Terkait Daerah yang Harus Dilakukan Pembangunan Drainase	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		36	4	0	40
Rata-Rata		18	2	0	20
Persentase		90%	10%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.7 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 18 orang dan persentasenya adalah 90%, sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik”

adalah rata-rata 2 orang dengan persentase 10%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan bahwa pihak pegawai mengaku sudah melakukan penyusunan program dan juga melakukan pelaksanaan riset terlebih dahulu sebelum menjalankan program pembangunan drainase di Kota Pekanbaru. Adapun data terkait program yang disusun oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel V.8 :Data terkait program pembangunan system Drainase Lingkungan di Kota Pekanbaru per April 2018 oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

No	Jenis Program	Tahun Pelaksanaan	Detail Pelaksanaan Program	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Saluran Drainase	2014-2015	2 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 2 Kecamatan. (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu atribusi kegiatan)
2	Saluran Drainase	2014-2015	3 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 3 Kecamatan. (Pada tahun 2015 dikeluarkan menjadi salah satu atribusi kegiatan)
3	Saluran Drainase	2014-2015	7 Kecamatan	Perencanaan Saluran Lingkungan 7 Kecamatan
4	Saluran Drainase	2015	-	-
5	Saluran Drainase	2016	-	-
6	Saluran Drainase	2017	-	-
7	Saluran Drainase	2018	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru

Guna melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, maka akan disajikan hasil penelitian dalam bentuk penyajian wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dimana dalam hal ini di wakikan oleh Bapak Baharufahmi, ST yang menjabat selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara ini adalah berkaitan dengan pembahasan indikator yang pertama yaitu tentang “Efektifitas” dengan masing-masing sub indikatornya yang membahas tentang “Penyusunan Program dan juga Pelaksanaan Riset terkait lokasi pembangunan drainase” dan tanggapan yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Pembangunan yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR tentunya sudah melalui tahapan riset yang dilakukan, kita melakukan pemantauan terhadap titik-titik rawan di hampir seluruh titik Kota Pekanbaru, karna sebelum program di tanda tangani dan di Sah kan oleh kepala Dinas, maka terlebih dahulu tim di bentuk untuk melakukan kajian dan analisis-analisis tersebut, nantinya skala prioritas juga akan kita buat dalam proses pembangunan drainase yang dilaksanakan” (Wawancara Tanggal 18 Desember 2018, Baharufahmi. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengakui bahwa proses riset dan juga penyusunan program telah dilakukan oleh pihak mereka, dimana dalam pelaksanaannya juga ditentukan skala prioritas terkait dengan lokasi-lokasi yang akan di bangun drainasenya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis memang menemukan fakta yang sesuai dengan pernyataan masyarakat, dimana banyak titik-titik banjir yang terjadi di jalan-jalan pekanbaru didasari dari system drainase yang tidak bekerja secara optimal, meskipun tidak dipungkiri ada beberapa drainase yang bekerja dengan optimal dan baik, tetapi sebagian besar drainase tersebut juga tidak mampu menampung air hujan yang turun. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat penulis berikan dalam pembahasan indikator yang pertama yaitu “Efektifitas”, jawaban yang didapatkan adalah “Cukup Baik” dengan alasan seperti yang penulis jelaskan di atas.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah aktivitas untuk meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam menghasilkan atau melaksanakan sesuatu. Jadi efisien dapat diartikan dengan kemampuan untuk bekerja dengan baik dan memperoleh hasil yang baik dengan menggunakan waktu, uang, dan hal yang lainnya dengan cara yang paling efektif. **Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.**

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke dua yaitu indikator yang membahas tentang “Efisiensi” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.9 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembentukan Tim Kerja	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Ketersediaan Anggaran Kerja	17 (85%)	3 (15%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		36	4	0	40
Rata-Rata		18	2	0	20
Persentase		90%	10%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.9 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 18 orang dan persentasenya adalah 90%, sedangkan repsonden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 2 orang dengan persentase 10%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Baik”, adapun penjelasan dan alasan yang diberikan oleh pihak Pegawai terkait dengan jawaban yang diberikan di atas adalah dikarenakan pihak pegawai mengakui bahwa proses pembentukan tim kerja dan ketersediaan anggaran untuk menjalankan kegiatan program pembangunan system drainase sudah dipenuhi oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Dan untuk pembentukan tim kerja, pihak Pegawai mengakui sudah memiliki tim pengawas yang di tugaskan di bawah

naungan dari Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dan juga berkoordinasi dengan Bidang Sumber Daya Air, dan susunan dari tim ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Bidang Bina Marga. (Shanti Rahmayanti, ST)
- b) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. (Baharufahmi,ST)
- c) Staf masin-masing bidang yang terdiri dari 20 Orang.

Sementara itu, untuk proses pembangunan system drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada tahun 2018, ketersediaan anggaran yang di alokasikan untuk proses pembangunannya yaitu melalui 4 (empat) tahap pembangunan, dimana masing-masing tahapan pembangunan memiliki anggaran yaitu:

Tabel V.10 : Ketersediaan Anggaran untuk proses pembangunan drainase di Kota Pekanbaru.

No	Pembangunan	Tahun	Anggaran
1	Wilayah I	2018	Rp 6.470.910.200.00,-
2	Wilayah II	2018	Rp 18.994.037.500.00,-
3	Wilayah III	2018	Rp 3.427.481.000.00,-
4	Wilayah IV	2018	Rp 3.609.500.000.00,-
Total Anggaran Untuk Tahun 2018			Rp 32.501.928.700.00,-

Sumber : *Dinas PUPR Kota Pekanbaru Tahun 2018*

Guna melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, maka akan disajikan hasil penelitian dalam bentuk penyajian wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dimana dalam hal ini di wakilkkan oleh Baharufahmi. yang menjabat selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara ini adalah berkaitan dengan pembahasan indikator yang

kedua yaitu tentang “Efisiensi” dengan masing-masing sub indikatornya yang membahas tentang “Pembentukan tim kerja” dan “Ketersediaan anggaran kerja” adalah sebagai berikut:

“Setiap melakukan tindakan pembangunan terhadap tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tentunya akan ada tim-tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut, dan saya rasa itu bagian dari pembentukan tim kerja kami, dan anggaran juga tentunya tersedia, jika tidak tersedia, maka pembangunan tidak mungkin di tanda tangani dan di laksanakan proses pembangunannya” (Wawancara Tanggal 18 Desember 2018, Baharufahmi. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses pembangunan dilapangan memang sudah dijalankan proses pembangunan di beberapa titik, akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak penulis ketahui apakah melalui proses pembentukan tim kerja atau tidak, dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga kurang tepat sasaran, dimana proses pembangunan lebih banyak di tempat-tempat yang memang bukan sebagai prioritas yang rawan tergenang disaat musim hujan.

Dimana pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan pembangunan tidak melihat segi prioritas, hal ini di buktikan dari pembangunan yang dinilai masih salah dalam titik rawan yang ada kota Pekanbaru, pembangunan dilakukan justru di lokasi yang belum memerlukan drainase secara mendesak, sementara jalan-jalan yang tidak memiliki drainase dan tergenang banjir saat hujan justru tidak di lakukan pembangunan drainase.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N.Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang membahas tentang indikator yang ke dua yaitu indikator yang membahas tentang “Kecukupan” yang memiliki pembahasan pada masing-masing Sub Item Penilaian, dan adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.11 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Perbaikan Terhadap Drainase yang Rusak	16 (80%)	4 (20%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Kondisi Drainase Di Lapangan	14 (70%)	6 (30%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		30	10	0	40
Rata-Rata		15	5	0	20
Persentase		75%	15%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.11 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 15 orang dan persentasenya adalah 75%,

sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 5 orang dengan persentase 15%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan, bahwa pihak pegawai menilai dalam melakukan pelaksanaan perbaikan terhadap drainase yang rusak serta melakukan pemantauan terhadap kondisi drainase di lapangan sudah cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan, misalnya jika ada drainase yang rusak, tentunya akan dilakukan proses perbaikan dengan waktu yang cepat dan efisien serta selalu melakukan pemantauan terhadap drainase-drainase yang tidak sesuai dengan luas jalan.

Guna melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, maka akan disajikan hasil penelitian dalam bentuk penyajian wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dimana dalam hal ini di wakilkkan oleh Baharufahmi. yang menjabat selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara ini adalah berkaitan dengan pembahasan indikator yang pertama yaitu tentang “Kecukupan” dengan masing-masing sub indikatornya yang membahas tentang “Pelaksanaan Perbaikan Terhadap Drainase Yang Rusak & Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Kondisi Drainase Dilapangan” adalah sebagai berikut:

“Jelas, kita ada waktu-waktu pemantauan terhadap drainase yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kawasan kota Pekanbaru, dan tindak lanjutnya pastinya pelaksanaan evaluasi, setelah di evaluasi, apabila diperlukan perawatan dan perbaikan, pastinya akan dilakukan perbaikan ataupun perawatan.” (Wawancara Tanggal 18 Desember 2018, Baharufahmi. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Pekanbaru)

Berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengakui bahwa mereka telah melaksanakan proses pemantauan dan perbaikan terhadap drainase yang telah tersedia di kota Pekanbaru, tetapi di luar itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa dilapangan memiliki situasi yang berbeda dari penjelasan yang diberikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di atas, dimana masih banyak drainase yang memerlukan perbaikan dan bahkan tidak berfungsi sama sekali dikarenakan kerusakan atau dikarenakan penumpukan sampah yang terjadi.

Untuk melengkali jawaban di atas, penulis akan menyajikan juga hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan masyarakat, dimana hasil penelitian ini nantinya berguna untuk menjadi jawaban pembanding antara pegawai dan juga masyarakat, dan adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel V.12 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Kinerja Dinas PUPR Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Perbaikan Terhadap Drainase yang Rusak	2 (10%)	14 (70%)	4 (20%)	20 (100%)
2	Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Kondisi Drainase Di Lapangan	6 (30%)	12 (60%)	2 (10%)	20 (100%)
Jumlah		8	26	6	40
Rata-Rata		4	13	3	20
Persentase		20%	65%	15%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.12 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat pada kategori “Baik” adalah rata-rata 4 orang dan persentasenya adalah 20%, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 13 orang dengan persentase 65%. Sedangkan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat pada kategori “Kurang Baik” rata-rata berjumlah 3 orang dengan persentase 15%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Baik” adapun alasan yang diberikan oleh responden terkait dengan jawaban yang diberikan diatas adalah dikarenakan bahwa masyarakat menilai pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum secara maksimal dalam melakukan perbaikan atau melakukan pemantauan, karena masih banyak drainase yang mengalami kerusakan ataupun dalam keadaan kotor dan tersumbat sehingga air tidak bisa mengalir dengan baik. Dan akibat dari permasalahan tersebut, jalan-jalan tersebut pasti akan di genangi air disaat hujan turun dengan intensitas sedang sampai dengan intensitas tinggi.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Pemerataan disini adalah terkait meratanya pembangunan drainase setiap jalan baik itu di jalan besar atau protokol maupaun di jalan gang-gang yang ada di Kota Pekanbaru. Suatu pembangunan tertentu

mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Jadi pemerataan berpatokan pada keadilan dan kewajaran. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

Tabel V.13 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase.

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Perawatan Terhadap Drainase	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Masyarakat Untuk Menjaga Drainase	16 (80%)	4 (20%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		34	6	0	40
Rata-Rata		17	3	0	20
Persentase		85%	15%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.13 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, jawaban yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 17 orang dan persentasenya adalah 85%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” memiliki rata-rata sebanyak 3 orang dengan persentase 15%. Sementara itu untuk jawaban pada kategori “Kurang Baik”, tidak ada satu orangpun responden yang memberikan jawaban mereka terhadap kategori ini, dan dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang

paling dominan dari jawaban yang diberikan oleh responden pegawai ini adalah jawaban pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan, Pihak pegawai mengakui sudah melakukan perawatan terhadap drainase serta sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menjaga drainase yang ada disekitaran lokasi mereka tinggal. Untuk proses perawatan, pihak pekerjaan umum tentunya bekerja sama dengan pihak dinas terkait lainnya seperti Dinas Kebersihan yang memiliki tugas di bidang kebersihan, sementara perawatan nyata dan berbentuk fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perbaikan terhadap bangunan fisik dari drainase tersebut.

Adapun untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk penyajian wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dimana dalam hal ini di wakilkkan oleh Baharufahmi. yang menjabat selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara ini adalah berkaitan dengan pembahasan indikator yang ke empat yaitu tentang “Pemerataan” dengan masing-masing sub indikatornya yang membahas tentang “Pelaksanaan Perawatan dan Pelaksanaan Sosialisasi” dan tanggapan yang diberikan oleh beliau terhadap pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan sosialisasi yang kami lakukan tidak bersifat sosialisasi yang langsung berhadapan dengan masyarakat, atau bersifat tatap muka dengan masyarakat, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan lebih kepada pencegahan aja, seperti larangan membuang sampah dan juga mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di atas drainase yang telah terpasang atau yang telah selesai di bangun, dengan demikian maka nantinya drainase tersebut akan berfungsi dengan maksimal, karna pada dasarnya masalah yang timbul selama ini lebih kepada

kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat fasilitas yang telah disediakan” (Wawancara Tanggal 18 Desember 2018, Baharufahmi. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan responden dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bawah pelaksanaan terhadap proses perawatan dan sosialisasi yang menjadi tugas dari pihak Dinas telah dilakukan dengan baik, hal ini disampaikan langsung oleh Baharufahmi, ST yang menjabat selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Selain dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis juga melengkapi penelitian penulis dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap masyarakat sebagai responden yang mana fungsi dari jawaban yang diberikan masyarakat nantinya dapat di jadikan jawaban pembanding dalam proses penelitian skripsi ini, dan adapun hasil pengumpulan data terkait dengan indikator yang ke 4 (empat) di atas adalah sebagai berikut:

Tabel V.14 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Sistem Drainase.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Perawatan Terhadap Drainase	1 (5%)	14 (70%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Masyarakat Untuk Menjaga Drainase	3 (15%)	16 (80%)	1 (5%)	20 (100%)
Jumlah		4	30	6	40

Rata-Rata	2	15	3	20
Persentase	10%	75%	15%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.14 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat pada kategori “Baik” adalah rata-rata 2 orang dan persentasenya adalah 10%, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 15 orang dengan persentase 75%. Sedangkan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat pada kategori “Kurang Baik” rata-rata berjumlah 3 orang dengan persentase 15%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat mengatakan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru memang sudah ada melakukan perawatan tetapi tidak merata, dan responden juga mengakui bahwa ada juga masyarakat yang melakukan aktivitas berjualan di atas drainase sehingga mengganggu fungsi dari drainase tersebut hingga penumpukan sampah yang terjadi di dalam drainase yang dimaksud.

Dan untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru kepada masyarakat, bentuk pelaksanaannya hanya dengan pengumuman dari spanduk dan juga pemberitahuan secara langsung, tetapi sifat dari sosialisasi ini tidak dilakukan setiap saat, hal ini di akui oleh masyarakat setempat yang penulis berikan angket dan alasan terhadap pilihan jawaban yang mereka pilih.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas kebutuhan dari masyarakat. Secara

singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat Dunn (dalam Subarsono, 2013:126). Responsivitas yang diperlukan dalam hal ini adalah tanggapan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Pekanbaru dalam menangani keluhan dari masyarakat serta dampak dari kinerja terhadap pembangunan sistem drainase. jika tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Pekanbaru ini positive maka mereka akan melaksanakan tugasnya akan baik juga, dan sebaliknya, apabila tanggapan merka negative, maka di dalam pelaksanaan tugasnya kurang baik. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

Tabel V.15 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tanggap Terhadap Perkembangan Kondisi Di Lapangan.	19 (95%)	1 (5%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Memberikan Respon Terkait Laporan Kerusakan Drainase.	17 (85%)	3 (15%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		36	4	0	40
Rata-Rata		18	2	0	20
Persentase		90%	10%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.15 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang di berikan oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 18 orang dan persentasenya adalah 90%,

sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 2 orang dengan persentase 10%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan, bahwa pihak pegawai mengakui sudah menilai cepat tanggap terhadap perkembangan kondisi di lapangan, dan memperbaiki drainase yang rusak dengan cepat dan tepat, hal ini merupakan bentuk respon atau kepedulian Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terhadap laporan dari masyarakat atas kerusakan drainase yang terjadi dilapangan.

Adapun untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk penyajian wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dimana dalam hal ini di wakikan oleh Baharufahmi, yang menjabat selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara ini adalah berkaitan dengan pembahasan indikator yang ke empat yaitu tentang “Responsivitas” dengan masing-masing sub indikatornya yang membahas tentang “Tanggap terhadap perkembangan kondisi dilapangan dan memberikan respon terkait laporan kerusakan drainase di Kota Pekanbaru” dan tanggapan yang diberikan oleh beliau terhadap pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

“Tentunya Dinas Pekerjaan Umum selalu tanggap terhadap situasi dilapangan, meskipun ada beberapa perbaikan yang terkendala proses pembangunannya, itu dikarenakan beberapa faktor penghambat saja, misalnya seperti proses anggaran yang terbatas, proses pembangunan yang tidak bisa setahap sekaligus, harus melalui beberapa fase atau beberapa tahap, dan juga masalah teknis lainnya, tetapi diluar itu pihak Dinas Pekerjaan Umum tentunya selalu tanggap dengan keluhan ataupun laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat”

(Wawancara 18 Desember 2018, Baharufahmi. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, pihak nya telah memberikan respon terhadap laporan-laporan dan juga keluhan yang diberikan oleh masyarakat, dan mereka juga telah menyediakan nomor yang bisa di hubungi oleh masyarakat atau masyarakat di persilahkan datang secara langsung untuk memberikan laporan kepada pihak Dinas Perhubungan dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Guna melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, maka penulis akan menyajikan hasil pengumpulan data yang penulis lakukan dilapangan dengan respondennya adalah masyarakat, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mencari jawaban pembanding antara jawaban dari pihak dinas dan juga pihak masyarakat, hal ini tentunya akan menyajikan jawaban yang seimbang dan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Adapun hasil penelitian dengan masyarakat dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.16 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Sistem Drainase

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tanggap Terhadap Perkembangan Kondisi Di Lapangan	3 (15%)	12 (60%)	5 (25%)	20 (100%)

2	Memberikan Respon Terkait Laporan Kerusakan Drainase	1 (5%)	16 (80%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		4	28	8	40
Rata-Rata		2	14	4	20
Persentase		10%	70%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.16 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat pada kategori “Baik” adalah rata-rata 2 orang dan persentasenya adalah 10%, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 14 orang dengan persentase 70%. Sedangkan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat pada kategori “Kurang Baik” rata-rata berjumlah 4 orang dengan persentase 20%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah jawaban pada kategori “Cukup Baik” hal ini dikarenakan bahwa masyarakat menilai pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Pekanbaru memang sudah berupaya untuk melakukan pembangunan terhadap drainase yang ada di Kota Pekanbaru, tetapi pembangunan yang dilakukan tidak mampu melihat sisi prioritas terkait dengan lokasi mana yang paling membutuhkan pembangunan ataupun pelebaran terhadap drainase nya.

Dan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dimana penulis melakukan observasi secara langsung, penulis memang menemukan jawaban yang sesuai dengan yang diberikan oleh masyarakat di atas, dimana masih banyak titik-titik yang tergenang air akibat meluapnya drainase yang ada di jalan-jalan Kota Pekanbaru, salah satunya adalah di Jalan HR.Soebrantas Panam, Jl.Arifin Ahmad,

Jl.Kaharudin Nasution (Depan Kampus UIR), Jl.Sudirman depan Awal Bros, Jl.Riau dan lokasi lain yang memang memiliki masalah pada system drainasenya.

Dengan demikian, diharapkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan perbaikan dan melakukan analisis ulang terhadap titik-titik rawan banjir yang di akibatkan oleh system drainase yang tidak berfungsi secara maksimal. Khususnya di daerah-daerah yang telah penulis sebutkan di atas. Hal ini tentunya memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan dan juga perekonomian masyarakat, dimana apabila terjadi luapan banjir, maka usaha-usaha masyarakat di sepanjang lokasi banjir tersebut akan di tutup dan tidak dapat beroperasi sama sekali.

Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan indikator yang ke enam, dimana pada indikator ini pembahasan yang di teliti adalah terlaksanakan evaluasi dan juga pembangunan drainase yang sesuai dengan kebutuhan volume air di titik-titik yang telah di sebutkan pada pembahas di atas.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan pembangunan dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif untuk dijadikan rekomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif karena ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Ketepatan yang harus diperhatikan dalam pembangunan sistem drainase ini adalah waktu pelaksanaannya, tujuan dari pelaksanaan, pemertaan pembangunan, serta dampak dari pelaksanaan pembangunan drainase yang akan di capai. Jika ketiga hal tersebut sudah tepat maka dapat dikatakan pembangunan drainase terlaksana dengan baik. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para responden yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya pada tabel dan sajian analisis di bawah ini:

Tabel V.17 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Koreksi Terhadap Drainase yang Tidak Berfungsi Maksimal	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Pembangunan Drainase Sesuai Dengan Kapasitas yang Dibutuhkan	16 (80%)	4 (20%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		36	4	0	40
Rata-Rata		18	2	0	20
Persentase		90%	10%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.17 di atas, dapat di lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang ada pada kategori “Baik” adalah rata-rata 18 orang dan persentasenya adalah 90%, sedangkan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik”

adalah rata-rata 2 orang dengan persentase 10%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari pegawai ini adalah pada kategori “Baik” hal ini dikarenakan, bahwa pihak pegawai mengakui sudah mengukur dan menganalisis terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembangunan drainase baik dari ukuran volumenya ataupun ketahanan konstruksinya drainase tersebut dan melakukan pengecekan atau koreksi terhadap drainase yang tidak berfungsi dengan baik.

Adapun untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk penyajian wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dimana dalam hal ini di wakikan oleh Bapak Baharufahmi, yang menjabat selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara ini adalah berkaitan dengan pembahasan indikator yang ke enam dan yang terakhir yaitu tentang “Ketepatan” dengan masing-masing sub indikatornya yang membahas tentang “Pelaksanaan koreksi terhadap drainase dan juga pembangunan drainase sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan” dan tanggapan yang diberikan oleh beliau terhadap pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

“Saya kira pembangunan yang kita lakukan itu sifatnya merata untuk semua lokasi yang sudah di lakukan kajian, memang saat ini belum sepenuhnya secara keseluruhan terlaksana pembangunannya, masalahnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu anggaran dan permasalahan sumber daya manusianya, tetapi kita upayakan pembangunan akan dilakukan secara merata di seluruh kota Pekanbaru” (Wawancara Tanggal 18 Desember 2018, Baharufahmi. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah berupaya melakukan pembangunan di seluruh sektor kota Pekanbaru, pelaksanaan pembangunan terhadap drainase di akui melalui beberapa tahapan, hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti keterbatasan dari anggaran yang tersedia dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang kota Pekanbaru yang terbatas.

Tabel V.18 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaksanaan Koreksi Terhadap Drainase yang Tidak Berfungsi Maksimal	3 (15%)	14 (70%)	3 (15%)	20 (100%)
2	Pembangunan Drainase Sesuai Dengan Kapasitas yang Dibutuhkan	1 (5%)	16 (80%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		4	30	6	40
Rata-Rata		2	15	3	20
Persentase		10%	75%	15%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan penjelasan pada tabel V.18 di atas, dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat pada kategori “Baik” adalah rata-rata 2 orang dan persentasenya adalah 10%, dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” adalah rata-rata 15 orang dengan persentase 75%.

Sedangkan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat pada kategori “Kurang Baik” rata-rata berjumlah 3 orang dengan persentase 15%. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat tanggapan yang paling dominan dari masyarakat ini adalah pada kategori “Cukup Baik”. Adapun alasan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan jawaban cukup baik di atas adalah dikarenakan masyarakat menilai bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cenderung tidak serius melakukan pembangunan, dimana masyarakat menilai bahwa permasalahan yang berkaitan system drainase di Kota Pekanbaru ini sudah cukup lama, dan dari tahun ke tahun menjadi pembahasan yang selalu menjadi keluh kesah masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak langsung dari banjir yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi secara langsung penulis dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa proses pembangunan drainase yang terjadi di Kota Pekanbaru memang bisa dikatakan cukup lambat dan jalan di tempat, maksudnya adalah, jalan-jalan yang seharusnya diprioritaskan justru tidak terkena dampak dari pembangunan dan pelebaran drainase yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan umum nya. Jalan-jalan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan adalah seperti Jalan HR.Soebrantas Panam, Jl.Arifin Ahmad, Jl.Kaharudin Nasution (Depa Kampus Uir), Jl.Sudirman depan Awal Bros, Jl.Riau, Jl.Dharma Bakti, Labuh Baru, dan lokasi lain yang memang memiliki masalah pada system drainasenya.

C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasing-masing indikator di atas yang mana diantaranya adalah indikator yang pertama yang membahas tentang “Efektivitas” kemudian indikator yang kedua adalah “Efisiensi”, indikator ke tiga “Kecukupan” dan indikator ke empat adalah “Pemerataan”, dan indikator yang ke lima adalah “Responsivitas” , serta indikator yang ke enam adalah “Ketepatan” dan didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan baik yang mana dalam melakukan observasi penulis melakukannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditentukan oleh penulis.

Setelah dihitung hasil dari tanggapan responden yang berdasarkan kuesioner dari ke-enam indikatornya, maka, dapat dibuat rekapitulasi dari hasil keseluruhan tabel-tabel yang ada pada masing-masing indikatornya, guna untuk memperoleh hasil keseluruhannya, dan dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan tanggapan responden. Dengan demikian, ke-enam indikator yang telah di jabarkan di atas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi untuk mengetahui hasil secara keseluruhannya. Berikut adalah hasil rekapitulasi dari hasil kuesioner yang disebarakan dengan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta masyarakat. Adapun hasil rekapitulasi yang di dapat adalah sebagai berikut:

Tabel V.19 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Terkait Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

1	Efektivitas	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
2	Efisiensi	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
3	Kecukupan	15 (75%)	5 (25%)	0 (0%)	20 (100%)
4	Pemerataan	17 (85%)	3 (15%)	0 (0%)	20 (100%)
5	Responsivitas	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
6	Ketepatan	18 (90%)	2 (10%)	0 (0%)	20 (100%)
Jumlah		104	16	0	120
Rata-Rata		17	3	0	20
Persentase		85%	15%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.19 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase, dengan menggunakan teori sebagai tolak ukur, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan, maka di peroleh rata-rata responden memberikan tanggapan pada kategori “Baik” yaitu 17 orang responden dengan persentase (85%), dan pada kategori “Cukup Baik” responden yang memberikan tanggapan rata-rata 3 orang responden dengan persentase (15%), dan tidak ada yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik”.

Kesimpulan yang di dapat dari hasil rekapitulasi di atas adalah jawaban yang di dominasi dengan jawaban pada kategori “Baik”, jawaban yang di dapatkan di atas menggambarkan bahwa pihak responden pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru memiliki jawaban terhada

penyusunan skripsi ini dengan masing-masing analisisnya seperti terlaksananya proses penyusunan program, terlaksananya riset, pembentukan tim kerja, dan juga ketersediaan anggaran yang digunakan untuk membangun drainase tersebut.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi terkait dengan penelitian dan penyajian tabel terhadap masing-masing indikator yang telah penulis lakukan dengan responden masyarakat, hasil rekapitulasi di bawah ini nantinya akan menyimpulkan jawaban dari keseluruhan jawaban yang telah di buat rata-rata nya, dan adapun hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan dari responden masyarakat di atas adalah sebagai berikut:

Tabel V.20 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kecukupan	4 (20%)	13 (65%)	3 (15%)	20 (100%)
2	Pemerataan	2 (10%)	15 (75%)	3 (15%)	20 (100%)
3	Responsivitas	2 (10%)	14 (70%)	4 (20%)	20 (100%)
4	Ketepatan	2 (10%)	15 (75%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		10	57	13	80
Rata-Rata		3	14	3	20
Persentase		15%	70%	15%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.19 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung terhadap Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Sistem Drainase, dengan menggunakan teori sebagai tolak ukur, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan, maka di peroleh rata-rata responden memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Baik” yaitu 14 orang responden dengan persentase (70%), dan pada kategori “Baik” responden yang memberikan tanggapan rata-rata 3 orang responden dengan persentase (15%), dan responden yang memberikan tanggapan pada kategori “Kurang Baik” rata-rata berjumlah 3 orang dengan persentase 15%. Adapun jawaban paling dominan dalam rekapitulasi di atas adalah jawaban pada kategori “Cukup Baik”, hal ini tentunya memberikan jawaban yang sesuai dengan pembahasan pada masing-masing indikator tersebut sebelumnya, dimana dari keseluruhan indikator yang diteliti, seluruh jawaban yang di dapat memiliki jawaban dengan dominan jawaban yaitu “Cukup Baik”. Selanjutnya penulis akan menyajikan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembangunan terhadap system drainase yang ada di kota Pekanbaru. Dan adapun faktor-faktor penghambat yang di hadapi oleh Dinas PUPR adalah sebagai berikut:

D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Dalam Pembangunan Sistem Drainase.

Proses pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap masyarakat tentunya melalui tahapan-tahapan yang memang akan menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, karna hal tersbut akan melibatkan banyak pihak

dan bermacam-macam pemikiran serta penyusunan rencana kerja serta program terhadap pelaksanaan program tersebut, dan untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam menjalankan proses kebijakannya dalam melakukan pembangunan terhadap sektor system drainase di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikannya di bawah ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan keterangan-keterangan yang di sampaikan oleh responden pada saat sesi wawancara, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah dari segi Anggaran yang terbatas, dimana keterbatasan anggaran yang tersedia tersebut tentunya akan menghambat pembangunan drainase secara merata di seluruh Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang di miliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dimana hal ini berdampak kepada proses pembangunan yang tidak bisa di jalankan secara serentak karena keterbatasan Sumber Daya Manusia tersebut.
3. Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat Kota Pekanbaru, hal ini dapat di lihat dari kenyataan dilapangan yang memberikan fakta bahwa banyak masyarakat yang membangun bangunan di atas Drainase dan juga

melakukan aktivitas berjualan di atasnya, dan juga kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, wawancara dengan *key informan* dilapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuisioner. adapun kesimpulan secara keseluruhan penelitian ini adalah berada pada kategori “Cukup Baik”.
2. kendala yang di hadapi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah dari segi Anggaran yang terbatas, dimana keterbatasan anggaran yang tersedia tersebut tentunya akan menghambat pembangunan drainase secara merata di seluruh Kota Pekanbaru. Kemudian keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang di miliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dimana hal ini berdampak kepada proses pembangunan yang tidak bisa di jalankan secara serentak karena keterbatasan Sumber Daya Manusia tersebut. Dan yang terakhir adalah Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat Kota Pekanbaru, hal ini dapat di lihat dari situasi kenyataan

dilapangan yang memberikan fakta bahwa banyak masyarakat yang membangun bangunan di atas Drainase dan juga melakukan aktivitas berjualan di atasnya, dan juga kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan juga kepada masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari buruknya drainase yang tersedia di Kota Pekanbaru, dan saran yang akan penulis berikan kepada pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pekanbaru agar mengajukan penambahan anggaran untuk proses perawatan dan perbaikan serta pembangunan system drainase yang tersedia di Kota Pekanbaru, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan perbaikan drainase yang tersedia saat ini.
2. Penulis menyarankan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru agar menambah jumlah dari Sumber Daya Manusia (SDM) nya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dari pelaksanaan pembangunan drainase yang ada di kota Pekanbaru.
3. Saran selanjutnya adalah kepada masyarakat, dimana penulis menyarankan agar lebih menumbuhkan kesadaran diri terhadap pentingnya menjaga kebersihan yang di mulai dari lingkungannya masing-masing, selanjutnya kebiasaan tersebut tentunya akan berdampak kepada lingkungan secara umum di Kota Pekanbaru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. G, Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Indrapura.
- M. Manullang. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen* Cetakan 16. Yogyakarta
- Mahmudi, 2010 *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. *Sumber Daya Manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Sumber Daya Manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Eresco
- _____. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Musanef. 1982. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Siswanto Sastrohadiwiryo. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suripin. 2004. *Sistem Drainase Yang Berkelanjutan*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat
- _____, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- _____, 2005. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat
- _____. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat
- _____. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat
- Terry, R George. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. 2003. Cetakan ke 7: Penerbit PT. Bumi Aksara.

Wibowo. 2008. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada

Dokumentasi Penelitian:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Zulkifli, DKK. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan
Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013*. Pekanbaru : Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

